

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, *Good Government Governance*, Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Rininta Eka Kusumawati¹, Nur Laila Yuliani^{1*}

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: nurlailay@unimma.ac.id

DOI: 10.31603/bacr.7059

Abstract

*The village government apparatus's performance in providing services to the community needs supervision because there are still complaints from the community and there is an imbalance between the regulations and how they are implemented, leading to the government apparatus's poor performance. The performance of the village government apparatus is primarily related to public services, productivity, and accountability. This study intends to investigate how village government officials' performance is affected by their knowledge of government regulations, good government governance, the quality of their human resources, and information technology. The village administrators in the villages of the Ngadirejo sub-district are the sample for this study. According to the purposive method, 57 respondents' samples can be processed for this investigation. Validity and reliability checks, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing with the coefficient of determination, *f* test, and *t* test are some of the data analysis techniques applied. The findings indicated that good government governance has a positive effect on the performance of the village government apparatus. Meanwhile, understanding of government regulations governing village funds, human resource quality, and information technology have no effect on the performance of the village government apparatus.*

Keywords: *Understanding of Government Regulations, Good Government Governance, Quality of Human Resources, Information Technology, Performance of Village Government Apparatus*

Abstrak

Kinerja aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan pengawasan karena masih adanya keluhan dari masyarakat serta adanya ketidaksinkronan antara aturan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa sehingga kinerja aparatur pemerintah dinilai buruk. Kinerja aparatur pemerintah desa terutama terkait dengan pelayanan publik, produktivitas, dan akuntabilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa, *good government governance*, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan sampel perangkat desa pada desa di kecamatan Ngadirejo. Berdasarkan metode *purposive sampling* jumlah sampel yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah 57 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linear



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

berganda dan pengujian hipotesis meliputi koefisien determinasi, uji f dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Sedangkan pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Pemerintah, *Good Government Governance*, Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

1. Pendahuluan

Kinerja merupakan hasil pencapaian secara nyata dalam periode tertentu baik secara individu ataupun secara kelompok. Kinerja aparatur pemerintah desa adalah satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu ([Pratiwi & Ulfah, 2018](#)). Menurut Kabag Humas Setda Kabupaten Temanggung Sumarlinah, Kabupaten Temanggung memperoleh predikat “B” dalam penilaian tersebut tentunya masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah target kinerja yang belum tercapai dengan sempurna, yaitu terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan indikator kinerja yang belum tercapai di bidang pelayanan publik ([krjogja.com](#)). Hal tersebut diketahui dengan survei yang dilakukan terhadap kepuasan pelayanan publik di masyarakat. Pada tahun 2020, indikator peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 90,34, mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat pada tahun 2019 yang memperoleh 79,75. Dengan dilaksanakan survei dapat diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.

Disisi lain kinerja aparatur pemerintah masih memerlukan pengawasan karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih terlihat adanya keluhan dari masyarakat yang diberikan oleh perangkat desa. Perangkat desa kadangkala berangkat ke kantor pada siang hari dan pulang tidak sesuai jam yang telah ditetapkan, yang seharusnya pagi jam 08.00 dan pulang pada jam 16.00 hal tersebut berbanding terbalik dengan yang sudah ditentukan para aparatur tidak disiplin pada waktu sehingga mempersulit masyarakat dalam mengurus kepentingannya. Adanya ketidak-sinkronan antara aturan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa sehingga kinerja aparatur pemerintah akan dinilai buruk.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ngadirejo masih terdapat indikator yang belum optimal diantaranya yaitu belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, belum optimalnya pemahaman perundang-undangan, dan belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan. Dalam mengelola akuntabilitas dana desa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memfasilitasi pendidikan dan budi pekerti yang luhur. Kemudian pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi semakin canggih untuk memudahkan mengambil informasi dalam pengambilan keputusan ([RENSTRA, 2020](#)).

Kinerja aparatur pemerintah desa pada Kecamatan Ngadirejo dalam memberikan pelayanan masih tergolong rendah karena masih terdapat indikator yang belum berjalan dengan baik dalam mengelola dana desa. Kinerja aparatur pemerintah desa terutama terkait dengan pelayanan publik, produktivitas, dan akuntabilitasnya. Hal ini yang menjadi permasalahan dasar

pada kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Ngadirejo dalam melaksanakan kebijakan peraturan pemerintah daerah yang mengatur fungsi dan tugasnya kepala desa. Dari faktor tersebut berdampak pada kualitas pendidikan formal dan informal yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa Kecamatan Ngadirejo.

Sesuai data Rencana Strategis dari Kecamatan Ngadirejo, bahwa masih terdapat desa yang mempunyai kinerja belum maksimal dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Karena untuk SDM-nya masih sangat kurang, dan dalam melakukan pekerjaannya masih bertumpu pada satu orang yang mempunyai keahlian dibidangnya atau hanya dikerjakan oleh orang tertentu. Kemudian dalam penggunaan teknologi informasi perangkat desa masih terdapat kesulitan dalam menjalankannya. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Giripurno dan Desa Mangunsari yaitu bapak Adi Setyawan (Sekretaris Desa Giripurno) dan ibu Retno Setyabudi (Sekretaris Desa Mangunsari) pada rabu (01/09/2021) bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengalami ketidaksesuaian, yang mana antara staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di tempat pada saat jam kantor, jam kerja pegawai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat kesulitan menyelesaikan segala keperluannya. Para aparatur desa datang kadang siang dan pulang tidak menentu dan membuat masyarakat harus menunggu dalam proses pelayanannya. Kemudian dalam menggunakan teknologi informasi perangkat desa hanya mengandalkan ke satu orang saja. Dengan ketidaksinkronan antara aturan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa, hal itu sangat tidak baik untuk dilakukan oleh aparatur pemerintah desa, dan aparatur seharusnya melakukan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemahaman terhadap peraturan pemerintah sangat diperlukan oleh para pegawai sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat berdampak dengan hukum. Aparatur pemerintah diharapkan untuk selalu mempelajari dan mengikuti perkembangan peraturan pemerintah, sehingga permasalahan yang dikarenakan penggunaan aturan lama sampai pada pemahaman peraturan yang salah dapat diminimalisir. Pengelolaan dana desa yang baik akan berpengaruh terhadap pembangunan desa baik dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh [Karima et. al., \(2021\)](#), [Hafiz \(2017\)](#) dan [Razi \(2017\)](#) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [Waksito \(2019\)](#) dan [Karima et. al., \(2021\)](#) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran sudah tertuang dalam 9 program Reformasi Birokrasi Nasional antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan. Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian dari [\(Pratiwi & Ulfah, 2018\)](#). Penelitian [Raheni & Asri \(2019\)](#) dan [Rumalolas \(2018\)](#) bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan penelitian ini

tidak sejalan dengan penelitian [Nurbaeti & Nugraha \(2019\)](#) menunjukkan bahwa *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah. Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuan ([Sudiarianti, 2015](#)). Kapasitas sumber daya manusia harus memadai sangat diperlukan agar mampu menjalankan sistem dengan baik dan menghasilkan kinerja yang berkualitas. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah aparatur desa, dimana mereka yang menjalankan semua kegiatan dalam pengelolaan keuangan. Jika desa memiliki aparatur yang berkualitas dan memiliki kemampuan akuntansi yang baik, maka akan lebih mudah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas.

Sebaliknya, jika aparat yang dimiliki desa tidak berkualitas maka akan sulit bagi desa untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian ([Mada et. al., 2017](#)). ([Rahmawati, 2015](#)) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Sedangkan menurut [Widyatama et. al., \(2017\)](#) kompetensi SDM tidak berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi desa untuk pihak pengambilan kebijakan publik dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa.

Selain itu faktor yang berpengaruh kepada aparatur pemerintah desa adalah teknologi informasi. Saat ini kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Hampir semua bidang kehidupan, bisnis dan pemerintahan telah terpengaruh oleh teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki banyak dampak positif, diantaranya mempermudah mendapatkan informasi yang diinginkan, kapanpun dan dimanapun. Semua ini dicapai hanya dengan menghubungkan komputer atau *smartphone* ke internet. Selain memperoleh informasi, teknologi tersebut juga memudahkan komunikasi dengan pihak lain di seluruh dunia.

Teknologi informasi merupakan kebutuhan dasar pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi. Penguasaan teknologi informasi oleh pegawai organisasi berdampak besar terhadap kinerja organisasi. Berkat penggunaan teknologi informasi ini, organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari tradisional menjadi modern. Teknologi informasi berkaitan dengan layanan karena kualitas layanan adalah kecepatan layanan teknologi informasi ([Agatha & Handayani, 2020](#)). Dengan adanya teknologi informasi juga, pelayanan yang diberikan khususnya kepada organisasi akan semakin cepat dan akurat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh [Marhaen & Jaenab \(2021\)](#) bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan oleh [Kusuma et. al., \(2020\)](#) dan [Amran, \(2020\)](#) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan penelitian dari [Agatha & Handayani \(2020\)](#) menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian [Pratiwi & Ulfah \(2018\)](#) tentang faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa. Perbedaan penelitian ini yaitu menambahkan variabel independen yaitu teknologi informasi sesuai dengan penelitian ([Agatha dan Handayani, 2020](#)) dan objek penelitian. Alasan penambahan variabel teknologi informasi yaitu karena dalam mengelola dana desa terdapat prosedur yang ditetapkan

oleh pemerintah pusat salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Sehingga aparat pemerintah desa harus dapat memanfaatkan penerapan teknologi informasi dengan baik dan maksimal agar dapat mengelola dana desa semakin baik. Motivasi penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah desa. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa, penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance*, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap kinerja aparat pemerintah desa.

2. Metode

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngadirejo. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, Kriteria sampel yang digunakan untuk memilih responden dalam penelitian ini meliputi a) perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa; b) memiliki masa kerja minimal 2 tahun, dan c) tingkat pendidikan minimal SMP/SLTP.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Tabel 1. Definisi dan pengukuran variabel menunjukkan definisi dan pengukuran setiap variabel.

Tabel 1. Definisi dan pengukuran variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	Kinerja aparat pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang sudah ditentukan terlebih dahulu (Wuri <i>et. al.</i> , 2017).	Menggunakan instrumen dari Mahoney (1963) yang terdiri dari 8 item pernyataan dengan indikator: Perencanaan, Investigasi, Koordinasi, Evaluasi, dan Pengawasan
Pemahaman Peraturan Pemerintah	Pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami dan mematuhi atau memahami (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015).	Menggunakan instrumen dari Pratiwi & Ulfah (2018) yang terdiri dari 5 item pernyataan dengan indikator: Pemahaman peraturan pemerintah
<i>Good Government Governance</i>	<i>Good Government Governance</i> adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisiensi dan efektivitas dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif antara domain-domain (<i>state private sector and society</i>) (Sari, 2013).	Menggunakan instrumen dari Ambarwati <i>et. al.</i> (2015) yang terdiri dari 7 item pernyataan dengan indikator: Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran.

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan karyawan untuk menjalankan proses pemeriksaan berdasarkan keterampilan, latar belakang pendidikan, dan persyaratan seseorang harus diikuti agar dapat melakukan prosedur pemeriksaan, pelatihan dan sosialisasi perubahan regulasi (Sari dkk, 2013).	Menggunakan instrumen dari Suharto (2012) yang terdiri dari 6 item pernyataan dengan indikator: Pendidikan, Tanggung Jawab, Pengalaman, Pelatihan
Teknologi Informasi	Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas (Agatha & Handayani, 2020).	Menggunakan instrumen dari Komarasari (2016) yang terdiri dari 9 item pertanyaan dengan indikator: jumlah komputer yang ada dan tersedia, jaringan internet sudah terpasang dan dimanfaatkan sesuai ketentuan, proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi, adanya <i>software</i> pendukung, dan adanya jadwal pemeliharaan peralatan.

2.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini untuk uji validitas menggunakan *confirmatory factor analysis* (CFA) dengan kriteria bahwa instrumen dikatakan valid jika memiliki nilai *cross loading* > 0,5. Sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha* dengan kriteria instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > 0,7. Pengujian selanjutnya adalah analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis meliputi pengujian koefisien determinasi (R^2) dengan melihat nilai *adjusted r square*, pengujian ketepatan model dengan uji F dan uji t, dengan tingkat signifikansi 5% ([Ghozali, 2018](#)). Berikut persamaan regresi linier berganda:

$$KAP = \alpha + \beta_1 PPP + \beta_2 GGG + \beta_3 KSDM + \beta_4 TI + e$$

Keterangan:

KAP = Kinerja Aparatur Desa

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

PPP = Pemahaman Peraturan Pemerintah

GGG = *Good Government Governance*

KSDM = Kualitas Sumber Daya Manusia

TI = Teknologi Informasi
E = Standar Error

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran data yang digunakan dalam penelitian. Jawaban responden dalam penelitian ini rata-rata menjawab setuju. Hasil statistik deskriptif data pada penelitian ini dapat dilihat pada [Tabel 2](#).

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Pemerintah	57	3.00	5.00	4.00	0.48000
<i>Good Government Governance</i>	57	3.57	5.00	4.00	0.39286
Kualitas Sumber Daya Manusia	57	3.67	5.00	4.00	0.38852
Teknologi Informasi	57	3.33	5.00	4.00	0.44353
Kinerja Aparatur Desa	57	3.50	5.00	4.00	0.39301
Valid N (<i>listwise</i>)	57				

3.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa instrumen dari variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* lebih besar dari 0,5. Hal tersebut memberikan arti bahwa instrumen pada penelitian ini dikatakan valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,7. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada [Tabel 3](#).

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ketetapan
Pemahaman Peraturan Pemerintah	0.833	Reliabel
<i>Good Government Governance</i>	0.873	Reliabel
Kualitas sumber daya manusia	0.809	Reliabel
Teknologi informasi	0.912	Reliabel
Kinerja aparatur pemerintah	0.862	Reliabel

3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada [Tabel 4](#).

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	4.620	3.378		1.367	0.177
Pemahaman Peraturan Pemerintah	0.192	0.134	0.147	1.432	0.158
Good Government Governance	0.660	0.170	0.578	3.882	0.000
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.311	0.181	0.231	1.717	0.092
Teknologi Informasi	-0.046	0.115	-0.058	-0.400	0.691

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 4 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KAP = 4.620 + 0.192PPP + 0.660GGG + 0.311KSDM - 0.046TI$$

3.4 Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 61,6% dipengaruhi oleh variabel independen yang digunakan. Hasil uji koefisien determinasi dapat pada Tabel 5:

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.802 ^a	0.643	0.616	1.949

3.5 Uji F (Goodness of Fit)

Pengujian ini digunakan untuk melihat kelayakan model pada penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini fit. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5.564	4	1.391	23.437	0.000 ^p
Residual	3.086	52	0.059		
Total	8.650	56			

3.6 Uji t

Pengujian t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t

Variabel	t hitung	Sig.	T tabel	Keterangan
Pemahaman Peraturan Pemerintah	1,432	0,158	1.67469	H1 Tidak Diterima
Good Government Governance	3,882	0,000	1.67469	H2 Diterima
Kualitas Sumber Daya Manusia	1,717	0,092	1.67469	H3 Tidak Diterima
Teknologi Informasi	-0,400	0,691	1.67469	H4 Tidak Diterima

3.7 Pembahasan

a. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini karena sebagian besar responden dalam penelitian ini hanya lulusan SMA/SLTA bahkan masih ada beberapa yang hanya lulusan SMP. Kondisi ini tentu ikut memberikan kontribusi terhadap tingkat pemahaman perangkat desa terhadap peraturan pemerintah tentang dana desa. Sesuai pendapat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pegawai yang kompeten merupakan mereka yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang berpengaruh terhadap pekerjaan. Menurut [Ardianto \(2018\)](#) bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan aparat pemerintah di suatu pemerintah desa maka semakin tinggi kinerja aparatur pemerintah yang akan di hasilkan. seorang pegawai harus mampu untuk menumbuhkan tentang pemahaman peraturan pemerintah yang tinggi dengan pekerjaannya.

Jenjang pendidikan SLTP dan SLTA tentu tidak bisa dikatakan tidak relevan dengan pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa yang merupakan bidangnya orang akuntansi. Selain dari latar belakang pendidikan yang kurang relevan dengan bidang pekerjaannya, dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata usia responden lebih dari 40 tahun, tentu tidak bisa dikatakan muda dan sedikit banyak terhadap kinerja perangkat desa. Menurut penelitian sebelumnya, bahwa pegawai yang tua cenderung lambat dalam bekerja dan sulit dalam menerima teknologi baru.

Penelitian ini tidak sejalan dengan *theory agency* bahwa pemahaman peraturan pemerintah karena pada saat ini, hampir semua proses pengelolaan administrasi di desa sudah menggunakan komputer. Sehingga, selain dituntut untuk dapat menggunakan dan menguasai program-program komputer, perangkat juga harus memiliki pengetahuan di bidang akuntansi. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Nurina & Yahya \(2016\)](#), [Mubaraq \(2017\)](#), dan [Ramadhan \(2019\)](#) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Pratiwi & Ulfah \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

b. Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good government governance* telah meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini konsisten dengan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan pengungkapan yang relevan dan valid mengenai instansi. Hal tersebut karena pada pelaksanaan untuk transparansi dilaksanakan dengan sangat baik terlihat dari jawaban responden yang rata-rata menjawab cukup. Transparansi dilaksanakan secara baik yang terlihat dari jawaban responden. *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa karena dijadikan sebagai alat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa terutama pada sektor publik dan penerapan prinsip-prinsip tersebut memberikan dampak yang baik ([Ambarwati, 2015](#)).

Penerapan prinsip kemandirian dalam pengelolaan anggaran yang profesional bertabrakan dengan kepentingan dan pengaruh serta tekanan dari pihak luar, sehingga mendorong pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada *stakeholder*. Hal ini sangat didukung dengan peningkatan keuangan dengan diberikan diklat teknis serta bimbingan. Sedangkan dengan akuntabilitas yang baik, maka otomatis informasi yang disajikan sudah tepat. Dengan mempertanggungjawabkan anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipastikan dalam pengelolaan keuangan disiplin dalam bekerja sehingga tidak terjadi pemungutan liar atau terlibat KKN. SOP yang telah ditetapkan juga sepenuhnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [Pratiwi & Ulfah \(2018\)](#), [Claraini et. al. \(2017\)](#), [Wattimena \(2020\)](#) dan [Dariana & Harrie \(2020\)](#) menyatakan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian [Nurbaeti & Nugraha \(2019\)](#) yang menunjukkan bahwa *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

c. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap aparatur pemerintah desa. Hal ini dikarenakan bahwa, sumber daya manusia aparatur pemerintah desa di kecamatan Ngadirejo rata-rata belatar belakang pendidikan SLTA/SMA, sehingga masih perlu dilakukan pelatihan agar dapat meningkatkan peranannya dalam masyarakat. Dengan dilakukannya pelatihan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang ada, sehingga juga dapat meningkatkan kinerja dari perangkat desa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan *theory agency* bahwa kualitas sumber daya manusia diperlukan guna memperbaiki pelayanan dan kinerja agar lebih baik. Tanpa adanya kualitas sumber daya manusia dalam kinerja pemerintah maka akan gagal. Ketika kualitas sumber daya manusia meningkat maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan menjadi baik.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian [Widyatama et. al. \(2017\)](#) yang menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian [Suharto \(2012\)](#) yang menyimpulkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh [Riandani \(2017\)](#) dan [Nurjaya et al. \(2021\)](#) juga menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian [Pratiwi & Ulfah \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah.

d. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini dikarenakan bahwa teknologi informasi di pemerintah desa secara umum relatif kurang optimal dan belum menunjukkan arah *government* yang baik. Masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadi faktor teknologi informasi tidak berkembang dengan baik adalah pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut belum ditunjang dengan sistem yang dam proses kerja yang efektif, serta tidak memadainya anggaran

yang dialokasikan untuk pengembangan teknologi informasi pada masing-masing pemerintah Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya penggunaan komputer dalam menyelesaikan laporan dan melaporkan tugas. Teknologi informasi merupakan faktor utama bagi aparatur pemerintah desa dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga, jika teknologi informasi kurang optimal maka dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa ([Agatha & Handayani, 2020](#)).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *theory agency* yang menjelaskan bahwa dalam menggunakan teknologi informasi secara langsung aparatur pemerintah desa akan terbantu. Adanya penggunaan teknologi informasi yang tinggi ini dapat juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data, adanya teknologi informasi ini dalam pengelolaan dana desa maka akan mempermudah aparatur desa dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan [Agatha & Handayani \(2020\)](#) menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Sedangkan hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [Resfiana & Syamsir \(2019\)](#), [Suprianto \(2014\)](#) dan [Chintya \(2015\)](#) yang menyebutkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa, *good government governance*, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap kinerja aparatur pemerintah pada desa se-Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Sedangkan pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yaitu sistem keuangan desa karena Siskeudes memiliki peran penting terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dan dapat membantu kinerja pegawai desa.

Referensi

- Agatha Ludia Ayu, & Handayani, N. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budaya Organisasi dan Telnologi Informasi Terhadap Kinerja Pemerintah Aparat Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9).
- Alimbudiono, R. S., & Andono, F. A. (2004). Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, 5(2), 18–30.
- Ambarwati W., Suyono, E., & P., & Ratiwi, U. (2015). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Komitmen Organisasi terhadap Aparatur Pemerintahan. *SNA*, 16. www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
- Amin, M. A. M. (2010). Measuring the performance of Customs Information Systems (CIS) in

- Malaysia. *World Customs Journal*, 4(2), 89–104.
- Amran, A. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 1–19.
- Ardianto. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, 197–209.
- Astuti. (2016). *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1, 1–14.
- Bawono, I. R. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Chintya, I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi pada SKPD Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–14.
- Claraini, C., Savitri, E., & Wiguna, M. (2017). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 3110–3123.
- Dariana, & Harrie, A. M. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 124–139.
- Ghozali, I. (2018). *Apikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 2* (Edisi 5). Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hafiz, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pad. *JOM Fekon*, 4(1).
- Ichsan. (2013). *Teori Keagenan (Agency Theory)*. <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/>. 16 Desember 2019. (22.04).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2015). <http://kbbi.web.id/paham>
- Karima, D., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang). *E-JRA*, 10(06).
- Komasari, W. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(2), 65–66. <https://doi.org/10.1021/om050941q>
- Kusuma, Ri. B. F., Susbiyani, A., & Fitriya, E. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi dan

- Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 56, 1–9.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahoney, T. A. (1963). *Development of Managerial Performance: A Research Approach*. Cincinnati.
- Marhaen, & Jaenab. (2021). *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Pengembangan Potensi Dan Kinerja Pegawai Di BPMDES Kabupaten Bima*. 4(2), 886–895.
- Morikawa, T., H. Matsuda, I. Yamaguchi, Y. Pongpiriyadacha, and M. Y. (2004). *New Amides and Gastroprotective Constituents from the Fruit of Piper chaba*.
- Mubaraq, H. (2017). Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 19(02), 8841.
- Nurbaeti, T., & Nugraha, D. S. (2019). Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Garut). *Polban*, 1299–1311.
- Nurina, & Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Dan Ketaatan Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2).
- Nurjaya, Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, & Sunarsi, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, 4(3), 332–346.
- Pemerintah Kecamatan Ngadirejo. (2020). *RENSTRA*.
- Peraturan Pemerintah. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 429–440.
- Putra, D. E., Astuti, E. S., & Riyadi. (2015). Pengaruh Kemudahan Terhadap Kemanfaatan, Minat Dan Penggunaan E-Commerce. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 21(2), 1–8.
- Raheni, N. P. R., & Asri, D. P. I. G. A. . (2019). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1295. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p19>
- Rahmawati. H.I. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloquium*, 6, 305–313.
- Ramadhan, H. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntanis,*

dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Razi, R. F. (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 294–308.
- Republik, I. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*.
- Resfiana, & Syamsir. (2019). *Aparatur Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari*. 1–7.
- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 4–28. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2395>
- Rumalolas, R. (2018). Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Sari, N. P. Y. M. M., I Made Pradana Adiputra, S. E. (2013). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 2(1).
- Sudiaranti, N. M. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Penelitian Mandiri*, 4(71), 1–25.
- Suharto, A. A. (2012). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada inspektorat kabupaten kediri. *Ilmu Manajemen*, 3, 67–79.
- Suprianto, E. (2014). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. *Ekobis*, 15(1), 17–30.
- Temanggung, P. (2020). *LAKIP*.
- Toto Waksito, W. (2019). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kompetensi, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang Dengan Variabel Moderating Pemahaman Terhadap Peraturan Yang Berlaku. (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Batang)*.
- Wattimena, M. A. (2020). Implementasi Good Corporate Governance , Good Governance dan Kepemimpinan Situasional Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 1(2).
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
- Wuri, R. R., Kaunang, M., & Pioh, N. R. (2017). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).